

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mandiri terutama dalam mengelola biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sebab pemerintah pusat tidak lagi memberikan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung melainkan diharapkan dapat diperoleh secara mandiri dari berbagai sumber pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah tidaklah kecil terutama dalam mengatur keuangannya.

Anggaran merupakan pedoman yang sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran. Dalam hal ini kesemua aspek dari struktur otonomi daerah yang harus disusun harus berorientasi

pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money).

Pengukuran kinerja merupakan sesuatu proses sistematis dalam memperhitungkan apakah program/kegiatan yang sudah direncanakan cocok dengan rencana tersebut, serta yang lebih berarti apakah sudah menggapai keberhasilan yang sudah ditargetkan pada dikala perencanaan. Pengukuran kinerja berfungsi membantu para pengambil keputusan dalam memonitor serta mengevaluasi kinerja serta berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka pemenuhan tuntutan akuntabilitas publik.

Dalam konteks kinerja pemerintahan, penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pemerintah. Salah satu komponen laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu (Ratmono & Solihin, 2015). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian LRA harus disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Tujuan adanya LRA (PP No.71 Tahun 2010) antara lain: (1) menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, (2) memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi ukuran dan indikator kinerja seperti diuraikan di atas, LRA sebagai alat ukur finansial dinilai mampu menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Salah satu komponen yang merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja berdasarkan LRA adalah komponen belanja daerah. Belanja daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Sedangkan menurut Bastian (2006), belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Ratmono dan Solihin (2015) menyatakan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas: (1) belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja operasi (di antaranya belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial); (2) hibah, yaitu pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;

dan (3) bantuan sosial, yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, sesuai dengan motivasi daerah untuk mengembangkan wilayahnya berdasarkan potensi unggulan daerah (Sasana, 2011). Namun nampaknya belum tercapai dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu daerah di provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan daerah otonom, maka perlu dilakukan analisis terkait penggunaan sumber daya yang optimal untuk dapat meningkatkan pembangunan daerah tersebut. Optimalisasi sumber daya terkait potensi daerah dapat diketahui melalui analisis penggunaan anggaran belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Analisis tersebut didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015 – 2019 dengan mengambil judul **Analisis Kinerja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

- a. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Varians Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019?
- b. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019?

- c. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Keserasian Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019?
- d. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Varians Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019.
- b. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019.
- c. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Keserasian Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019.
- d. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja selama Tahun Anggaran 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam mengelola anggaran belanja daerah.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

